



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. ADI WARYANTO  
Jabatan : Pj. SEKRETARIS DAERAH  
selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : ZAENAL ARIFIN, S.IP  
Jabatan : BUPATI MAGELANG  
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Mungkid, Januari 2019

  
PIHAK KEDUA  
ZAENAL ARIFIN, S.I.P

  
PIHAK PERTAMA  
SETDA ADI WARYANTO  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680804 199203 1 007

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG**

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Meningkatnya sistem pendaftaran tanah	Persentase luas lahan bersertipikat	33,83 %
2.	Meningkatnya koordinasi tertib administrasi pertanahan	Cakupan koordinasi tertib administrasi pertanahan	100%
3.	Menurunnya konflik dan permasalahan pertanahan	Penyelesaian kasus tanah negara dan tanah perseorangan	100%
4.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan kecamatan, desa, dan kelurahan	Cakupan pelayanan kedinasan	100%
		Aplikasi PATEN	100%
5.	Meningkatnya tertib administrasi pelaksanaan kerjasama daerah	Jumlah kesepakatan kerjasama pemerintah daerah	10
6.	Meningkatnya tertib penataan batas antar wilayah	Persentase penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar pemerintah daerah	100%
7.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	Cakupan kelompok masyarakat dalam membangun desa	100%
8.	Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan desa	Cakupan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	100%
9.	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa	Persentase aparat desa yang sudah didiklatkan	100%
10.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan budaya kerja aparatur pemerintah daerah	Nilai AKIP Kabupaten	B
11.	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi kelembagaan perangkat daerah	Cakupan penataan OPD sesuai peraturan perundang-undangan	100%
		Persentase terisinya jabatan struktural eselon II, III, dan IV dan terisinya jabatan fungsional	100%
12.	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan pelayanan publik	Cakupan pedoman ketatalaksanaan yang tersusun.	100%
		Persentase UPP yang nilai IKM-nya meningkat	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
13.	Meningkatnya kualitas produk hukum dengan kajian dan evaluasi yang sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan agar dapat dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan supremasi hukum	Persentase kesesuaian antar produk peraturan perundang-undangan	100%
14.	Meningkatnya pengembangan budaya hukum di semua lapisan masyarakat demi tercapainya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam rangka supremasi hukum dan penyelesaian sengketa hukum	Persentase penyelesaian permasalahan hukum	100%
15.	Meningkatnya sarana dan prasarana hukum yang memadai guna peningkatan pelayanan informasi hukum	Website milik Pemda	8 Website
16.	Meningkatnya pembangunan ekonomi di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, pariwisata, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM, energi dan sumberdaya mineral, serta dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.	Persentase desa tertib administrasi pedlaksana raskin	39,8%
		Persentase rata-rata kenaikan harga barang dan jasa	0,5 %
		Jumlah LKM yang dipersiapkan menjadi badan hukum	273 LKM
17.	Meningkatnya kinerja BUMD	Persentase Peningkatan PAD	12,02%
18.	Meningkatnya kualitas pelaporan dan analisis pelaksanaan pembangunan	Cakupan pelaporan keuangan dan kinerja	100%
19.	Meningkatnya tertib administrasi pengendalian pembangunan daerah	Persentase peningkatan PAD	100%
20.	Meningkatnya kelancaran, transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah	Presentase perangkat daerah yang telah menggunakan LPSE untuk pengadaan barang dan jasa	100%
21.	Meningkatnya ketepatan sasaran penerima bantuan bagi masyarakat	Cakupan kelompok masyarakat dalam membangun desa	100%
22.	Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dan kesehatan	Cakupan fasilitasi kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat	100%
23.	Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana	Cakupan fasilitasi kegiatan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
24.	Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang agama, kebudayaan dan kesenian	Cakupan fasilitasi kegiatan peningkatan kehidupan sosial keagamaan	100%
25.	Meningkatnya penyiapan dan pengaturan kegiatan acara protokoler pimpinan dan pelayanan tamu daerah	Cakupan pelayanan kedinasan	100%
26.	Meningkatnya efektifitas publikasi pelaksanaan kebijakan dan hasil-hasil pembangunan serta pemerintahan dalam rangka pelayanan informasi kepada masyarakat	Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media massa seperti majalah, radio, dan televisi	19 Jam/ Hari
		Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan bidang kominfo dan kehumasan	50 peserta
27.	Meningkatnya kualitas analisis media dan informasi guna obyektivitas sajian informasi, berimbang dan bertanggungjawab dalam rangka membangun peningkatan kecerdasan dan daya kritis serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Cakupan kerjasama dengan media massa	100%
28.	Meningkatnya pengelolaan persandian, pelayanan ke rumahtangga pimpinan, efisiensi pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana di lingkup Sekretariat Daerah serta pelayanan administrasi keuangan lingkup pimpinan dan Sekretariat Daerah.	Opini BPK "WTP"	WTP
		Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%

No	Program	Anggaran	Keterangan Sumber Dana
1	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	147.332.000	Semua Kegiatan yang dilaksanakan di Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang bersumberkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magelang Tahun 2019
2	Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan	3.014.985.500	
3	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	15.000.000	
4	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	16.000.000	
5	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	27.271.000	
6	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	285.876.425	
7	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	100.000.000	
8	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	142.011.000	
9	Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa	1.431.797.000	
10	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	95.000.000	
		47.663.930	

No	Program	Anggaran	Keterangan Sumber Dana
12	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	193.737.300	
13	Program peningkatan disiplin aparatur	95.850.000	
14	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	98.941.875	
15	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	422.294.625	
16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala daerah/ Wakil Kepala Daerah	1.596.244.000	
17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	320.467.250	
18	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	1.874.226.190	
19	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	56.180.000	
20	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	864.248.500	
21	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	357.050.000	
22	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	707.669.030	
23	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	46.835.290	
24	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	414.474.000	
25	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	20.791.750	
<b>Jumlah :</b>		<b>12.391.946.665</b>	

Kota Mungkid, Januari 2019

**PIHAK KEDUA**



**ZAENAL ARAFIN, S.IP**

**PIHAK PERTAMA**



**SETDA**  
**DIS ADI WARYANTO**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 195609304 199203 1 007